

## **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017**

**Meiran Panggabean<sup>1\*</sup>, Eka Ria Lestari Matondang<sup>2</sup>**

*<sup>1,2)</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia*

### **ABSTRACT**

*The aims of this study is to examine and analyze the effect of local government spending, the human development index and economic growth on the poverty level of districts/cities in West Kalimantan Province. The method used in this study is a quantitative method using secondary data and the analysis technique in this study is panel data regression using Eviews 10 using the fixed effect no weights method with the Least Square Panel (PLS) method. The results of the study show that the regional government expenditure variables have a negative and not significant effect on the level of poverty, the human development index (HDI) has a negative and significant effect on poverty, economic growth has a positive and not significant effect on the poverty ( $p = < 0,05$ )*

**Keywords: Poverty, Regional Government Expenditures, Human Development Index, Economic Growth.**

### **1. PENDAHULUAN**

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang melekat dalam perjalanan proses pembangunan. Usianya sudah setua pembangunan itu sendiri. Maka tidak berlebihan kalau dikatakan kemiskinan absolut di negara yang berkembang sulit untuk dihilangkan. Walaupun telah disepakati dalam target SDGs tanpa kemiskinan tahun 2030, belum ada jaminan bisa tuntas dalam proses pembangunan.

Menurut Rugner Nurkse dalam Kuncoro (2006), kemiskinan adalah sebuah hubungan kausalitas melingkar artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang rendah juga. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat.

Dalam perkembangannya, memahami kemiskinan dalam konteks pembangunan, tidak cukup hanya melihat perubahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, melainkan jauh lebih bermakna jika mencermati penduduk miskin yang terpuruk jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Untuk itu, perlu diketahui indikator besaran Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Sebagai salah satu masalah nasional, strategi dan kebijakan penuntasan kemiskinan sudah banyak dilakukan, termasuk dengan cara peningkatan kualitas manusia melalui dimensi pendidikan,

---

\*Email : edampang@yahoo.co.id

kesehatan dan ekonomi. Pembangunan manusia melalui tiga dimensi tersebut--yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)—diharapkan dapat mengurangi kemiskinan secara permanen.

Menyelesaikan atau mentuntaskan kemiskinan secara permanen, tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan pembangunan, tetapi juga harus menjadi *tanggung jawab* bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada penduduk miskin untuk ikut serta dalam proses produksi dan kepemilikan aset produksi.

Bellinger (2007) mengungkapkan bahwa konsep kemiskinan itu sendiri melibatkan hal-hal seperti multidimensi, multidefinisi dan alternatif pengukuran. Strategi dalam penanggulangan kemiskinan didukung oleh tersedianya data kemiskinan yang akurat dan jelas agar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tepat pada sasaran demi berjalannya kebijakan-kebijakan dalam hal menurunkan angka kemiskinan.

Sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional, pembangunan daerah provinsi Kalimantan Barat masih belum dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin, selama periode 2012-2017, terus bertambah masih tergolong besar, tapi secara proporsional cenderung menurun dari 8,17% tahun 2012 menjadi 7,88% tahun 2017.

**Tabel 1. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat 2012-2017**

<b>Uraian</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	371.220	380.710	381.900	383.700	381.350	387.430
Persentase penduduk miskin (%)	8.17	8.24	8.54	8.03	7.87	7.88
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.05	1.19	0.98	1.29	1.3	1.23
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.2	0.28	0.18	0.32	0.31	0.29

*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (Data diolah)*

Persoalan kemiskinan di Kalimantan Barat tidak hanya pada jumlah penduduk miskin bertambah setiap tahunnya, tetapi juga semakin tingginya indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman yang semakin tinggi (dari 1,05 menjadi 1,23) mengindikasikan jumlah penduduk miskin yang pengeluarannya jauh di bawah garis kemiskinan semakin banyak dan indeks keparahan kemiskinan menandakan ketimpangan yang melebar (0,2 menjadi 0,29) di antara penduduk miskin. Keadaan demikian dapat dimaknai bahwa standar hidup penduduk miskin semakin rendah yang dapat berdampak buruk pada kualitas penduduk miskin (kualitas SDM) dan pada gilirannya berpengaruh pada percepatan peningkatan IPM.

Faktor kualitas sumber daya manusia juga bisa menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia yang direpresentasikan indeks pembangunan manusia dapat berpengaruh pada kemiskinan. Jika IPM rendah dapat mengakibatkan produktivitas kerja rendah. Produktivitas yang rendah memberikan dampak pada pendapatan masyarakat, di mana pendapatan yang diperoleh menjadi rendah. yang pada gilirannya menyebabkan tingginya angka kemiskinan.

Perkembangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat dari 2010 sampai 2017 menunjukkan trend positif dalam arti meningkat setiap tahunnya dari 61,97 (2010) menjadi 66,26 (2017). Pada periode yang sama, hanya di Kota Pontianak yang IPM nya masuk kategori tinggi (IPM < 70,00). IPM Kota Pontianak meningkat dari 74,87 (2010) menjadi 77,93 (2017). Hal ini menandakan bahwa Kota Pontianak cukup sejahtera dikarenakan Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki sarana dan prasarana Pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang lebih baik dibanding Kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat. Sementara itu, IPM terendah berada di Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar 61,52 point pada tahun 2017.

Selain indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada naik turunnya kemiskinan di suatu wilayah. Kondisi yang diharapkan dalam proses pembangunan adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan berkeadilan di masing-masing provinsi diikuti penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan (Seers, 1969 dalam Todaro 2016).

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Barat pada periode 2010 – 2017 cenderung turun namun berfluktuasi pada kisaran 4,80 – 6,10. Capaian tertinggi (6,05%) pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2013 dan capaian terendah (4,81%) terjadi pada tahun 2015. Jika ditelusuri per Kabupaten/Kota, ternyata Kabupaten Kubu Raya merupakan satu-satunya daerah dari 14 Kabupaten/Kota yang pertumbuhan ekonominya tinggi dan stabil pada 6,00% lebih dan cenderung meningkat selama periode 2010-2017.

Selain faktor kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi, besaran belanja pemerintah juga berkaitan dengan permasalahan kemiskinan. Belanja atau pengeluaran pemerintah pada berbagai bidang social- ekonomi diharapkan dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mengurangi jumlah dan proporsi kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2010 sampai 2017 mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2017 sebesar Rp. 675, 31 Milyar. Jumlah pengeluaran pemerintah daerah tertinggi berada di Kabupaten Ketapang yaitu sebesar Rp. 986,18 Milyar jumlah tersebut lebih tinggi dari jumlah pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk jumlah pengeluaran pemerintah daerah terendah berada di Kabupaten Sekadau yaitu sebesar Rp. 452,43 Milyar.

Mencermati factor-faktor yang terkait dengan kemiskinan, naiknya indeks pembangunan manusia, berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya belanja pemerintah, tidak serta merta menurunkan atau menaikkan jumlah dan proporsi penduduk miskin. Terkait dengan keadaan ini, maka perlu dipertanyakan apakah indkes pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan ataukah tidak terhadap kemiskinan?

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### *2.1. Teori Kemiskinan*

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi kekurangan hal yang biasa dimiliki seseorang seperti sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal ini sangat berhubungan dengan standar hidup masyarakat. Tingkat kemiskinan (*poverty rate*) adalah persentase pada populasi dengan keluarga yang pendapatannya berada pada tingkat absolut yang dinamakan garis kemiskinan (Mankiw,dkk, 2014).

Pendapat lain dikemukakan Sharp, *et al* (2000) mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi sebagai berikut:

1. Secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya oleh setiap individu yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia satu sama lain.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan setiap individu dalam mengakses permodalan.

Ketiga penyebab kemiskinan ini berpatokan pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*). Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000) yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Menurut Ragnar Nurkse menyatakan bahwa adanya ketertinggalan, ketidaksempurnaan pada pasar, dan sedikitnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas.

Produktivitas yang rendah mengakibatkan pendapatan yang masyarakat terima juga rendah. Pendapatan yang rendah akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Investasi yang rendah berakibat pada keterbelakangan maupun ketertinggalan pembangunan. Oleh karena itu, setiap usaha dalam mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini. Menurut *World Bank* (2006) kemiskinan adalah: *"The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other"*.

## 2.2. Teori Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah secara mikro diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan guna menyediakan barang publik yang dimana pihak swasta tidak dapat menyediakan dan sebagai pengaruh dari adanya kegagalan pasar. Segala perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

- 1) Perubahan akan permintaan terhadap barang publik
- 2) Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam hal menghasilkan barang publik dan perubahan kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam hal proses produksi
- 3) Perubahan kualitas pada barang publik
- 4) Perubahan akan harga-harga faktor produksi.

Pengeluaran Pemerintah secara makro menurut teori hukum Wagner mengatakan apabila pendapatan perkapita meningkat maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah juga. Jika pengeluaran pemerintah secara umum meningkat maka hal ini sesuai dengan teori Adolf Wagner yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama akan semakin meningkat. Tendensi ini disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan dari pemerintah.

## 2.3. Teori Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia yaitu indeks pembangunan manusia yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari segi daya beli masyarakat. Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan mengalami peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sifat antar individu, disparitas dari segi geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam macam sehingga mengakibatkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan. Menurut Sen (1995) dalam Todaro (2003) menggambarkan indeks ini

sebagai “pengukuran vulgar” oleh karena keterbatasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal yang lebih sensitif dan berguna dari pada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan.

#### 2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Perry *et al.*, (2006) pertumbuhan ekonomi penting untuk membantu pengentasan kemiskinan. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada teori *trickle down effect* yang sangat dominan dalam teori-teori pembangunan pada era 1950 dan 1960 an. Teori *trickle down effect* mengungkapkan adanya aliran menetes ke bawah, dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui fungsi-fungsi dalam ekonomi.

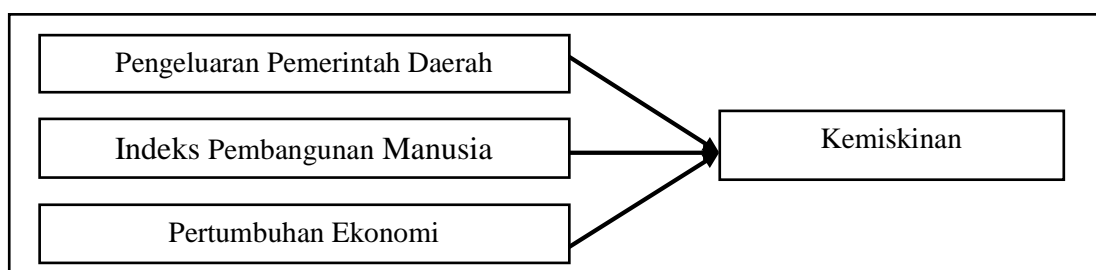
R. F. Harrod dan Evsey Domar merupakan ekonomi sesudah Keynes yang mengembangkan teori pertumbuhan Keynesian. Teori ini mengembangkan teori Keynes yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dalam jangka pendek, sedangkan menurut Harrod-Domar menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Harrod-Domar menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan jangka panjang mencapai kondisi yang mantap atau *steady growth*. Pertumbuhan yang mantap dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya barang-barang modal dan seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar.

Pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh penambahan kapasitas memproduksi, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Menurut Harrod-Domar untuk meningkatkan suatu perekonomian dalam hal pertumbuhan ekonomi diperlukan usaha pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang atau sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.

Teori Harrod-Domar juga menyatakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri menjadi penentu dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1999). Berikut ini adalah beberapa asumsi yang digunakan dalam teori:

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang digunakan secara penuh oleh masyarakat.
2. Perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan), di mana berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
4. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save*) besarnya tetap, begitu juga ratio antar modal dan output serta rasio penambahan modal-output.

Berikut ini penyajian model penelitian dan pengembangan hipotesis dari penelitian ini:



**Gambar 1. Model Penelitian**

H1: Pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan

H2: Indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan

H3: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

### 3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Data sekunder yang digunakan adalah data panel yaitu penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2010 sampai 2017 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 14 data mewakili Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui *library research* (studi pustaka). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Regresi data panel merupakan gabungan dari data silang dan data runtun waktu, dimana unit silang yang sama diukur pada waktu yang berbeda.

#### *Model Regresi*

Adapun persamaan regresi linear berganda dalam penelitian adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

- Y = Tingkat Kemiskinan
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien Variabel Independen
- i = Unit *Cross Section*
- t = Periode Waktu
- $X_1$  = Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
- $X_2$  = Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/kota
- $X_3$  = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota
- e = *error*

Terdapat fleksibilitas dalam penyusunan model sehingga sebagian besar model yang ada berisi atau lebih dari satu variabel yaitu variabel independen.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

Nilai probabilitas dari uji *Chow* adalah sebesar  $0,0000 <$  taraf signifikan  $0,05$  artinya model *fixed effect* lebih baik daripada model *common effect*. Setelah melakukan uji *Chow* dan mendapatkan model terpilih maka dilanjutkan dengan melakukan uji *Hausman* didapat nilai probabilitas sebesar  $0,3353 >$  taraf signifikan  $0,05$  yang artinya model *random effect* lebih baik daripada model *fixed effect*.

Model yang dipilih yaitu model *fixed effect (No Weights)*, karena berdasarkan nilai dari *R-Square* sebesar 0,966771 dan probabilitas F-Statistik sebesar 0.000000 serta *Sum squared resid* sebesar 30,94593 dengan 1 variabel yang signifikan yaitu indeks pembangunan manusia dan 2 variabel yang tidak signifikan yaitu pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan model yang terpilih dan terbaik yaitu model *fixed effect (No Weights)*, maka diperoleh nilai konstanta, koefisien, dan probabilitas yang ditunjukkan dalam persamaan berikut :

$$Y = 22,89147 - 0,142092X_{1it} - 0,182165X_{2it} + 0,014114X_{3it} \dots\dots\dots (2)$$

Adapun interpretasi dari nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta

Dapat diketahui bahwa nilai konstanta adalah sebesar 22,89147 yang artinya apabila pengeluaran pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi tetap atau tidak mengalami perubahan maka tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat sebesar 22,89%.

2. Pengeluaran Pemerintah Daerah ( $X_1$ )

Dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan hubungan yang negatif dan tidak signifikan dilihat dari nilai probabilitas  $0,7091 > 0,05$  terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Dengan nilai koefisien sebesar  $-0,142092$  ini artinya apabila pengeluaran pemerintah daerah meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,14%, dengan asumsi *ceteris paribus*.

3. Indeks Pembangunan Manusia ( $X_2$ )

Dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan dilihat dari nilai probabilitas  $0,0319 < 0,05$  terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Dengan nilai koefisien sebesar  $-0,182165$  ini artinya apabila indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,18%, dengan asumsi *ceteris paribus*.

4. Pertumbuhan Ekonomi ( $X_3$ )

Dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan yang positif dan tidak signifikan dilihat dari nilai probabilitas  $0,8299 > 0,05$  terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Dengan nilai koefisien sebesar  $0,014114$  ini artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,014%, dengan asumsi *ceteris paribus*.

*Uji Statistik t*

Uji t statistik untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau  $\alpha = 0,05$ . Berikut ini merupakan tabel dari hasil uji t statistik berdasarkan pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 2. Hasil Uji t Statistik**

Variabel Independen	Prob.	t-statistic	Keputusan
Pengeluaran Pemerintah Daerah	0,7091	-0,374209	Tidak Signifikan
Indeks Pembangunan Manusia	0,0319	-2,177169	Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi	0,8299	0,215365	Tidak Signifikan

Berikut ini adalah penjabaran dari uji t dari setiap variabel independen (*independent variable*):

#### 1. Pengeluaran Pemerintah Daerah ( $X_1$ )

Variabel pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar -0,374209 dengan nilai probabilitas sebesar 0,7091 yang mana lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Oleh karena itu, variabel pengeluaran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.

#### 2. Indeks Pembangunan Manusia ( $X_2$ )

Variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar -2,177169 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0319 yang mana lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh karena itu, variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.

#### 3. Pertumbuhan Ekonomi ( $X_3$ )

Variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 0,215365 dengan nilai probabilitas sebesar 0,8299 yang mana lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Oleh karena itu, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.

### *Uji Statistik F*

Berdasarkan pada hasil pengolahan data panel dengan *eviews* 10 diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 172,7478 dan nilai probabilitas sebesar 0,000000 yang mana lebih kecil dari taraf signifikan sebesar 0,05 artinya variabel pengeluaran pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan kalimat lain, tinggi rendahnya jumlah dan proporsi kemiskinan secara simultan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, IPM dan pertumbuhan ekonomi. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,97 mengandung makna bahwa perubahan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu 97% dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi, dan selebihnya (3%) dipengaruhi oleh factor-faktor lain.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien pengeluaran pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil olah data *E-Views* yaitu sebesar -0,142092 menunjukkan pengaruh negatif maupun tidak signifikan di mana hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas uji t statistik yang lebih besar dari taraf signifikan yaitu sebesar  $0,7091 > 0,05$  dan adapun nilai t statistik sebesar -0,374209. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan tidak dapat diterima. Selain itu pengaruh yang tidak signifikan ini bisa disebabkan dari pemanfaatan dana untuk membiayai proyek-proyek perumahan dan fasilitas umum tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, seperti pembangunan atau perbaikan sarana dan prasana jalan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrullah (2014) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

### 4.2.2. Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari hasil regresi variabel indeks pembangunan manusia memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 1% maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan turun sebesar



0,18%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, oleh karena itu hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian dapat diterima. Hasil penelitian ini juga sependapat dengan Wahyudi (2010), di mana indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sitepu dan Sinaga (2003) menganalisis dampak investasi sumber daya manusia terhadap tingkat kemiskinan dan diperoleh hasilnya bahwa investasi sumber daya manusia untuk pendidikan mampu menurunkan *poverty incidence*, *poverty depth* dan *poverty severity* kecuali rumah tangga yang bukan sektor pertanian golongan atas yang berada di Desa, bukan angkatan kerja di Kota serta bukan pertanian golongan atas di Kota.

#### 4.2.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Koefisien pertumbuhan ekonomi yang diperoleh sebesar 0,014114 dan menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan di mana hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas uji t statistik yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu sebesar  $0,8299 > 0,05$  dan adapun nilai t-statistik variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,215365. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan tidak dapat diterima. Tidak signifikannya pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat karena untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat pada dasarnya ditopang oleh sektor konsumsi dari pada peran investasi maupun produksi, oleh karena itu kualitas pertumbuhan ekonomi tidak begitu baik untuk mengurangi angka kemiskinan. Pengaruh positif dan tidak signifikan ini sejalan dengan pendapat dari Tambunan (2001) menyatakan pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), dan selanjutnya akan memunculkan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan peningkatan kemiskinan.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan koefisien -0,142092 dan probabilitas 0,7091 ( $p > 0,05$ ), (2) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan koefisien -0,182165 dan probabilitas 0,0319 ( $p < 0,05$ ), dan (3) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan koefisien 0,014114 dan probabilitas 0,8299 ( $p > 0,05$ ).

Persoalan kemiskinan bukanlah persoalan mudah untuk dituntaskan. Meskipun IPM terus meningkat, pertumbuhan ekonomi tumbuh stabil dan pengeluaran pemerintah terus bertambah, ternyata hal ini tidak serta merta mengurangi jumlah penduduk miskin, bahkan ada fenomena memburuknya kualitas hidup penduduk miskin. Untuk itu perlu dikembangkan model pembangunan yang *pro poor* melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan hingga ke pedesaan. Mensinergikan pengelolaan dana desa dengan program kampung KB merupakan alternative untuk mengurangi kemiskinan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alhudori, M. (2017). *Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*. Jurnal Ilmiah, Vol. 1 No. 1. Jambi: Universitas Batanghari.
- Arsyad, L. (1997). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, edisi pertama. Yogyakarta: BPF.
- ..... (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Kalimantan Barat Dalam Angka tahun 2011*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- ..... (2012). *Kalimantan Barat Dalam Angka tahun 2012 s.d. 2018*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Bellinger, W. K. (2007). *The Economics Analysis of Public Policy*. Routledge: Oxon.
- Dumairy. (2000). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- <https://kalbar.bps.go.id/>. (2018). Pontianak: Diakses pada September 2018.
- Jhingan, M. L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Penerjemah: D Guritno, Edisi Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, masalah dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- ..... (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- ..... (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- ..... (2011). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- ..... (2014). *Pengantar Ekonomi Mikro: Principles of Economics*. Jakarta: Salemba Empat.
- Napitupuluh, A. S. (2007). *Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara*. Skripsi (2007). Sumatera Utara.
- Nasution, S. (2000). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Osinubi, T. S. (2005). *Macroeconometric Analysis Of Growth, Unemployment and Poverty in Nigeria, Pakistan Economic and Social Review*. Volume XLIII, No. 2 (Winter 2005), pp. 249-269.
- Perry GE, Arias OS, Lopez JH, Maloney WF, Serven L. (2006). *Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles*. New York: World Bank .
- Saputra, W. A. (2011). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/kota Jawa Tengah*. Skripsi (2011). Semarang: Universitas Diponegoro.

- Sen, A. (1995). *A Sociological Approach to The Measurement of Poverty: A Reply to Professor Peter Townsend*. Oxford Economic Papers 37:669-676.
- Soediyono. (1992). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukirno, S. (2010). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Suliswanto, M. S. W. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah, Vol. 8 No. 2 (2010). Malang: Universitas Brawijaya.
- Suparmoko, M. (2012). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Suparmoko, M dan Irawan. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE
- Tambunan, T. H. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P dan Stephen, C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- United Nations Development Programme (1995). *Human Development Report 1995*, New York: Oxford University Press.
- Wahyudi, M. S. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah, Vol. 8 No. 2 (2010). Malang: Universitas Brawijaya.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Pateda, Y, Masinambouw, V. A. J, dan Rotinsulu, T. O. (2017). *Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo*. (2017). Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Pratama, Y. C. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah, Vol. 4 No.2 (2014). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- World Bank. (2006). *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Jakarta: Indopov.